

Rp 1,58 M

Tanpa SK Bupati

■ Bantuan Olahraga Anggaran 2009

KETAPANG, TRIBUN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalbar, menemukan pemberian bantuan pembinaan pemuda dan olahraga senilai Rp 1,58 miliar tanpa Surat Keputusan (SK) bupati. Temuan ini sebenarnya sudah lama, yakni saat pemeriksaan terhadap pelaksanaan APBD 2009, yang hasilnya telah disampaikan pada Pemkab dan DPRD 11 Mei lalu.

Namun, Kepala Bagian Kesejahteraan (Kesra) Pemkab Ketapang, Mad Noor mengatakan, persoalan tersebut muncul akibat SK yang memang belum sempat disampaikan. Saat ini, menurut dia, permasalahan ini telah dinyatakan selesai.

"Kendalanya waktu itu, karena ada beberapa laporan yang menunggu tanda tangan Ketua KONI Ketapang," kata Mad Noor kepada *Tribun*, Minggu (24/10).

Ditegaskannya, SK bupati yang dipertanyakan pun sesungguhnya telah diterbitkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) yang saat itu dijabat Bachtiar. Dia meluruskan, saat BPK RI melakukan pemeriksaan, pihaknya sedang memanti Lapo-



TRIBUN/DOK

” BPK melakukan pemeriksaan pada Mei dan April. Saat ini semua belum selesai, sementara penyampaian SK harus bersamaan dengan LPj-nya. ”

MAD NOOR

Kabag Kesra Pemkab

ran Pertanggungjawaban (LPj) atas penggunaan dana tersebut.

"BPK melakukan pemeriksaan pada Mei dan April, sementara saat ini semua belum selesai. Sementara penyampaian SK harus bersamaan dengan LPj-nya," kata Mad Noor.

Itulah sebabnya, begitu hasil temuan tersebut dirilis BPK, pihaknya segera melengkapinya dengan berbagai kekurangan, termasuk SK yang disyaratkan. Sementara itu, anggota DPRD Ketapang Alfianur menuturkan, temuan BPK tidak hanya pada Bagian Kesra. Masih banyak temuan di beberapa dinas dan instansi lainnya.

Karena itu, dewan sedang melakukan koordinasi untuk meminta penjelasan kepada pihak-pihak tertentu. Artinya,

selain temuan pada Bagian Kesra tersebut, mereka juga akan menelusuri temuan lainnya.

"Kami sebenarnya sudah akan melakukan tindak lanjut untuk menggelar rapat fraksi. Namun karena adanya penetapan APBD Perubahan, sedikit ditunda. Fraksi kami dalam waktu dekat ini akan mempertanyakannya langsung kepada pihak terkait," kata Alfianur.

Ditambahkannya, jawaban dalam RAPBD Perubahan, meskipun telah disetujui, bukan berarti permasalahan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dengan serta merta diterima. Apalagi hingga kini jawaban dari Pemkab atas LHP BPK tersebut belum mereka terima.

"Kami hingga kini belum menerima jawaban dari eksekutif terkait temuan BPK tersebut. Jadi kami tetap akan mempertanyakan masalah ini," katanya.

Meski tanpa merincikan, Alfianur mengatakan temuan BPK cukup banyak. Karena itu, sikap terbuka harus ditunjukkan kepada masyarakat, terkait penggunaan anggaran.

"Khususnya bantuan sosial seperti ini. Dan lagi dana tersebut diberikan asal-asalan, tidak berdasarkan skala prioritas," ujar Alfianur.

Dia menegaskan, secepatnya pihak Pemkab harus segera memberikan jawaban menyeluruh terhadap berbagai temuan tersebut. (rhd)